e-ISSN: 2988-2311
p-ISSN: 2988-5434

DIVINITAS
JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI KONTEKSTUAL
Volume 3 No. 1, Januari 2025: 179 - 203

RELEVANSI KONSEP PENDIDIKAN PLATO DAN DRIYARKARA UNTUK PENGEMBANGAN KARAKTER KALOS KAGATOS CALON PEMIMPIN DI INDONESIA

Ferdinandus Iswandi [a,1,*]
Oktavianus Nefrindo [a,2]
JB. Heru Prakosa [a,3]

[a] *Fakultas Teologi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Indonesia*

[1] *egiwandi2000@gmail.com*
[2] *rnefrindo@gmail.com*
[3] *hprakosa@jesuits.net*

[*] *corresponding author*

ARTICLE INFO
Submitted : 02-02-2025
Accepted : 09-04-2025

Keywords:
Education,
Leadership,
Kalos Kagathos,
Plato,
Driyarkara,
Democracy,
Pluralism.

ABSTRACT

*Ideal leadership in a democratic system demands a leader who is not only intelligent but also possesses moral wisdom and integrity. The concept of *kaloskagathos*, introduced by Plato, describes an individual who excels both intellectually and ethically, making them worthy of leadership. On the other hand, N. Driyarkara emphasizes education as a process of humanization aimed at shaping individuals who are socially responsible and aware of communal solidarity. This article examines the concept of education for future leaders according to Plato and Driyarkara and its relevance in shaping democratic and pluralistic leadership in Indonesia. Through a literature review method, this study finds that leadership education should focus on character development, wisdom, and an understanding of diversity. An ideal education system for leaders in a pluralistic society like Indonesia must integrate philosophical approaches, leadership ethics, and humanistic values to foster social justice and harmony.*

DOI: https://doi.org/10.24071/div.v3i1.11627
https://e-journal.usd.ac.id/index.php/Divinitas
E: divinitas@usd.ac.id

This work is licensed under a CC BY-SA
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRAK

Kepemimpinan yang ideal dalam sistem demokrasi menuntut sosok pemimpin yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kebijaksanaan moral dan integritas. Konsep kalos kagathos, yang diperkenalkan oleh Plato, menggambarkan individu yang unggul secara intelektual dan etis, sehingga layak menjadi pemimpin. Di sisi lain, N. Driyarkara menekankan pendidikan sebagai proses humanisasi yang bertujuan membentuk manusia yang bertanggung jawab sosial dan memiliki kesadaran akan kebersamaan. Artikel ini mengkaji konsep pendidikan bagi calon pemimpin menurut Plato dan Driyarkara serta relevansinya dalam membentuk pemimpin di Indonesia yang demokratis dan pluralistik. Dengan metode kajian literatur, penelitian ini menemukan bahwa pendidikan calon pemimpin harus berorientasi pada pembentukan karakter, kebijaksanaan, serta pemahaman terhadap keberagaman. Pendidikan yang ideal bagi pemimpin dalam masyarakat plural seperti Indonesia harus mengintegrasikan pendekatan filosofis, etika kepemimpinan, dan nilai-nilai kemanusiaan agar mampu menciptakan keadilan sosial dan harmoni.

All rights reserved.

PENDAHULUAN

Indonesia kini menghadapi masalah-masalah demokrasi. Demokrasi mengalami degradasi sekaligus tercoreng. Kondisi ini disebabkan krisis moralitas dan pelanggaran kebijakan.[1] Lebih parah lagi, gelombang aksi massa bertajuk "Darurat Demokrasi Indonesia" digelar serentak di berbagai daerah. Protes ini dipicu oleh isu-isu mendesak, seperti revisi Undang-Undang Pilkada dan kondisi demokrasi yang semakin memburuk.[2]

Masalah besar lainnya dalam demokrasi Indonesia saat ini adalah kurangnya masyarakat yang berani mengkritik pemerintah, lemahnya pembinaan calon pemimpin di

[1] Fabio Maria Lopes Costa, "Demokrasi Indonesia Terdegradasi", (Februari 2024), https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/06/krisis-moralitas-akibatkan-degradasi-nilai-demokrasi-dalam-pemilu-2024, diakses pada 04 Oktober 2024

[2] Kompas. Com, "Live Peringatan Darurat Demokrasi: Saksikan Liputan Aksi Massa Mengawal Putusan MK", (Agustus 2024), https://nasional.kompas.com/read/2024/08/22/15324611/live-peringatan-darurat-demokrasi-saksikan-liputan-aksi-massa-mengawal.; diakses 14 Oktober 2024

partai politik, hilangnya oposisi, dan mahalnya biaya pemilu karena praktik politik uang yang luas. Selain itu, maraknya berita palsu, rendahnya etika politik warga, pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang belum terselesaikan, kebebasan media dan hak untuk berkumpul yang masih dibatasi, serta sikap tidak toleran terhadap kelompok minoritas juga menjadi tantangan serius.[3]

Di tengah situasi sosial dan politik di atas, Indonesia menghadapi tantangan besar. Negara ini perlu melahirkan pemimpin yang cerdas. Pemimpin tersebut juga harus memiliki integritas moral yang tinggi. Mereka perlu memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang baik. Masyarakat yang beragam ini memerlukan pemimpin yang menerima perbedaan. Mereka juga harus mampu membangun komunikasi dan menciptakan keharmonisan.[4] Dalam konteks ini, konsep kalos kagathos menjadi sangat penting. Konsep ini berasal dari pemikiran Yunani kuno, terutama dari Plato. Kalos kagathos menggambarkan pemimpin ideal yang bijaksana dan memiliki budi pekerti yang baik.[5] Ini sesuai dengan pandangan Xenophon yang membedakan antara orang bijaksana yang baik dan yang jahat. Baginya, rakyat yang baik selalu menghidupi prinsip kalos kagathos, yang selalu mengacu pada kebajikan moral tertentu.[6]

Plato percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membentuk pemimpin seperti itu. Pemimpin yang berciri kalos kagathos berarti "bijaksana dan baik." Ia melihat pendidikan bukan hanya tentang kegiatan untuk memberi pengetahuan melainkan juga

---

3 Wijayanto dan Fajar Nursahid, "Masalah-Masalah Demokrasi Kita Hari Ini", (Agustus 2019) https://news.detik.com/kolom/d-4650749/masalah-masalah-demokrasi-kita-hari-ini., diakses pada 01 Oktober 2024

4 S. Supriyono dan M. M. Adha, "Membangun Kepemimpinan berbasis Nilai-nilai Pancasila Dalam Perspektif Masyarakat Multikultural". *Jurnal Kultur Demokrasi* 9, no. 2, (2020): 10.

5 Siti Umroh, "Plato's Philosophy of Political Education as a Way for Candidates for Indonesian Leaders", *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 4 (2022): 1357.

6 Fritz-Gregor Herrmann, "Dynamics of Vision in Plato's Thought," *Helios* 40, no. 1 (2013): 283.

harus membentuk karakter dan moral.[7] Menurut Plato, pemimpin yang ideal harus menggabungkan kecerdasan dan nilai-nilai etika. Dengan cara ini, mereka bisa memimpin dengan bijaksana dan bertanggung jawab.[8]

Di sisi lain, Driyarkara juga menekankan pentingnya kemanusiaan dalam pendidikan. Ia percaya bahwa individu tidak hanya tubuh fisik. Manusia adalah makhluk utuh yang terdiri dari tubuh dan jiwa. Driyarkara berpendapat pendidikan harus memanusiakan individu. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan kodrat manusia. Proses ini akan mengembangkan karakter dan mental yang baik. Dalam konteks ini, Driyarkara mengajak kita untuk melihat pendidikan dengan cara baru. Pendidikan harus membentuk calon pemimpin yang cerdas, beretika, dan berintegritas. Pendidikan semacam itu dapat membentuk pemimpin yang menghargai perbedaan. Pemimpin juga mampu menciptakan keadilan sosial.[9]

Melalui artikel ini, penulis akan mengeksplorasi bagaimana konsep pendidikan calon pemimpin berciri kalos kagathos menurut Plato dan Driyarkara dapat diterapkan dalam konteks demokrasi di Indonesia. Pemahaman yang mendalam tentang nilai kepemimpinan yang baik diharapkan bisa menghasilkan pemimpin masa depan. Pemimpin-pemimpin ini harus mampu membawa perubahan bagi masyarakat dan bangsa.

METODE PENULISAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan. Melalui metode kepustakaan ini, penulis mengumpulkan data-data mengenai konsep-konsep

---

[7] Setyo Wibowo dan Haryanto Cahyadi, *Mendidik Pemimpin dan Negarawan* (Yogyakarta: Lamalera, 2014), 14.

[8] D. Berberabe and B. Marie, "Plato's Republic: The Role of Education in Democracy," *Budhi* 25, no. 3 (2021): 15-16.

[9] Sudiarja, dkk. (ed), *Karya Lengkap Driyarkara Esay-esay Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa,* 299.

pendidikan *kalos kagathos* dengan menyandingkan pemikiran Plato dan Driyarkara. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filsafat pendidikan. Melalaui pendekatan ini, penulis memahami konsep *kalos kagathos* menurut Plato dan pendidikan humanisasi menurut Driyarkara. Data yang diperoleh dari jurnal dan buku yang membahas pemikiran Plato lewat teks-teks klasik Plato dan pemikiran Driyarkara dapat membantu penulis dalam menyusun artikel ini. Penulis juga melengkapinya dengan beberapa sumber-sumber sekunder lainnya sebagai sumber pendukung, terutama relevansi konsep *kalos kagathos* dalam konteks pendidikan demokrasi di Indonesia sebagai tempat perjumpaan masyarakat.[10] Komparasi konseptual ini membandingkan perspektif kedua tokoh dalam membentuk pemimpin ideal. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pendidikan kepemimpinan yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia, guna melahirkan pemimpin berjiwa *kaloskagathos*.

PEMBAHASAN

Biografi Plato dan Konsep Pemikirannya

Plato lahir sekitar tahun 428/7 SM dalam suatu keluarga yang terkemuka di Athena.[11] Ia merupakan murid dari Socrates, dan dikemudian hari ia menjadi guru Aristoteles. Dalam sejarah Filsafat Barat, ia dikenal sebagai salah satu filsuf terbesar, terutama atas karya dan pemikiranya. Salah satu karyanya terpopuler sampai saat ini yaitu *Republik*. Dia juga mendirikan Akademi di Athena, yang merupakan sekolah filsafat pertama di dunia. Plato meninggal pada tahun 348/7 SM, tetapi warisannya dalam dunia filsafat tetap hidup dan relevan sampai saat ini.

---

[10] Sember primer yang digunakan oleh penulis adalah kajian terhadap buku Republik (Plato) sebagai dasar pemikiran mengenai pemimpin filsuf dan pendidikan karakter dan Karya-karya Driyarkara mengenai pendidikan humanisasi dan tanggung jawab sosial.

[11] Howard A. Ozmon and Samuel M. Craver, *Philosophical Foundation of Education* (Toronto: Meril Publishing Company, 1986), 3.

Selama masa kecilnya, ia hidup dalam situasi perang antara Athena melawan Sparta. Perang ini berakhir pada tahun 404 SM dan dimenangkan oleh pasukan Sparta.[12] Kemungkinan besar Plato terlibat dalam invasi militer selama perang terjadi. Kemenangan total Sparta atas Athena ini membawa dampak besar bagi kehidupannya. Di sisi lain, pemahaman Plato tentang dunia politik dipengaruhi oleh kondisi ketika ia hidup. Masa yang paling suram dalam hidupnya adalah saat ketika perang Peloponnesos meletus sedemikian rupa sehingga dunia Yunani mengalami krisis yang besar. Kota demi kota dilanda pertikaian internal yang mempertemukan kaum miskin melawan kaum kaya, sistem oligarki melawan sistem demokrasi.

Aristokles sebenarnya nama asli dari Plato. Hal ini disebabkan, karena ia mempunyai dahi dan bahu yang lebar. Julukan "bahu lebar" yang diberikan oleh gurunya mungkin tidak hanya mengacu pada fisiknya, tetapi juga pada kelebaran pikirannya dan kontribusinya yang besar dalam perkembangan ilmu filsafat.

Definisi Kalos Kagathos

Kata *kalos kagathos* berasal dari dua kata yaitu *Kalos* berarti tampan, indah, atau elok. Hal ini, selalu merujuk pada sifat feminin. Sedangkan kata *kagathos* atau *agathos* dalam terjemahan umum berarti 'baik' dengan makna "baik untuk dilihat dan menampakkan kebaikan dalam tindakan".[13] Kata 'baik' diartikan bukan dalam konotasi fisik melainkan merujuk pada kebajikan etis seseorang, misalnya: kebijaksanaan, integritas, keberanian, dan tanggung jawab. Secara keseluruhan Istilah *kalos kagathos* dalam konteks Yunani kuno

[12] George Klosko, *The Development of Plato's Political Theory* (edisi kedua), (New York: Oxford University Press, 2006), 1.

[13] K. J. Dover, *Greek Popular Morality In the time of Plato and Aristotle* (California: University Of California Press, 1974), 41.

merujuk pada individu yang baik dan mulia, atau individu yang mencerminkan keseimbangan antara jiwa dan tubuh.

Dalam bukunya Plato yang berjudul *Republik*, istilah *kalos kagathos* diartikan sebagai adil, bagus, mulia, dan baik. Keempat arti ini selalu dikaitkan dengan kepribadian seseorang sebagai pria sejati. Gambaran terhadap pria sejati adalah seseorang yang tidak hanya memiliki karakter yang baik, tetapi juga memiliki penampilan yang menarik. Konsep *kalos kagathos* telah lama menjadi ideal dalam budaya Yunani kuno, mengingat pria dihargai atas kebaikan batin dan kekuatan fisiknya. Menjadi pria sejati bukanlah hal yang mudah, tetapi merupakan tujuan yang patut diperjuangkan bagi setiap individu untuk mencapai kesempurnaan dalam segala aspek kehidupan.

Raja Filsuf sebagai Model Pemimpin Kalos Kagathos

Setelah Plato menyelesaikan penjelasannya tentang *polis* dalam Buku ke V, ia kemudian beralih merumuskan tentang konsep pemimpin yang ideal (472c4-473e5). Di bagian ini, ia menampilkan dialog Socrates dalam mewujudkan *polis ideal* sedemikian rupa sehingga filsuf menjadi raja untuk memimpin *polis.*

> *Unless, I said, philosophers become kings in our poleis or those now called kings and rulers genuinely and adequately philosophize, so that these two things, political power and philosophy, are coinstantiated, while the many natures of those who at present pursue either apart from the other are necessarily excluded, there can be no rest from troubles for our poleis, my dear Glaucon, nor I think for human beings in general. Nor, until this happens, will this constitution which we have been expounding in theory ever, so far as it is possible, come forth in nature and see the sunlight. It is because I saw how very paradoxical this statement is that I have for some time hesitated to make it. For it is hard to realize that there can be no happiness, public or private, in any other polis (473cII-eS).* [14]

[14] C. D. C. R E Eve, *Philosopher- Kings The Argument Of Plato's Republic* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, l988), 191.

Terjemahan:

> *Kecuali, kataku, para filsuf menjadi raja di polis kita atau mereka yang sekarang disebut raja dan penguasa berfilsafat dengan sungguh-sungguh dan memadai, sehingga kedua hal ini, kekuasaan politik dan filsafat, menjadi identik, sementara banyak sifat dari mereka yang saat ini mengejar salah satu secara terpisah dari yang lain tentu dikecualikan, tidak akan ada istirahat dari masalah bagi polis kita, Glaucon sayangku, juga tidak bagi manusia secara umum. Juga, sampai ini terjadi, konstitusi yang telah kita uraikan dalam teori ini tidak akan pernah, sejauh mungkin, muncul di alam dan melihat sinar matahari. Itu karena aku melihat betapa paradoksnya pernyataan ini sehingga aku ragu untuk mengatakannya untuk beberapa waktu. Karena sulit untuk menyadari bahwa tidak ada kebahagiaan, publik atau privat, di polis lain mana pun (473cII-eS).*

Dalam dialog ini, Socrates menghendaki seorang pemimpin dari kalangan filsuf yang mahir dalam berfilsafat dan berpolitik.

Mendidik Pemimpin Kalos Kagathos dengan Inspirasi dari Novel Jonathan Livingston

Novel *Jonathan Livingston Seagull* karya Richard Bach menggambarkan bagaimana mendidik seorang kader pemimpin. Dalam novel ini, diceritakan tentang seekor burung camar bernama Jonathan Livingston Seagull yang berani melawan nasib yang ditetapkan oleh para pendahulunya. Ia tidak seperti camar lainnya yang merasa cukup puas dengan keadaan mereka, yaitu terbang sejauh mereka memenuhi kebutuhan makan dan minum.

Setiap hari, Jonathan melatih dirinya terbang ke sana kemari sampai ia mahir dalam ilmu terbang. Ia selalu menjalani hidupnya dengan menuruti dorongan hati dan bakat alamiahnya. Namun, ia ditolak oleh kawanannya karena dianggap melawan tradisi. Di tengah situasi sulit ini, ia dihukum dan harus meninggalkan kawanan camar lainnya. Jonathan tidak menolak hukuman dari kawanannya. Ia pergi dan hidup terpisah dari mereka. Ia tetap meneruskan dorongan hati dan mengikuti bakat yang terpendam dalam dirinya. Di tengah situasi keterasingannya, ia menjalani pendidikan (*paideia*).[15] Singkat

[15] Setyo Wibowo dan Haryanto Cahyadi, *Mendidik Pemimpin dan Negarawan* (Yogyakarta: Lamalera, 2014), 13.

cerita, Jonathan menemukan makna hidupnya dengan berani ke luar dari belenggu kawanan camar lainnya. Bahkan, ia mengajari camar lain yang memiliki nasib serupa untuk berani ke luar dari situasi yang mereka hadapi.

Dari kisah ini, dapat digambarkan bahwa pendidikan menjadi seorang pemimpin bisa dan tidak bisa diprogramkan. Alasan mengapa menjadi seorang pemimpin tidak bisa diprogramkan adalah karena selalu berkaitan dengan bakat dan karunia yang diberikan oleh alam. Sementara itu, dalam arti tertentu, menjadi seorang pemimpin bisa diprogramkan melalui pendidikan yang sangat ketat. [16]

Novel Jonathan bisa ditafsirkan dengan alegori 'Gua' dari Plato. Alegori ini dimulai dengan penggambaran keadaan manusia yang terjebak dalam gua. Manusia yang terjebak dalam gua ini sudah dapat melihat bayangan-bayangan yang terpantul di dalam dinding gua. Namun, dalam situasi ini, mereka mencoba untuk ke luar dengan keadaan paksa guna menemukan kebebasan. Hal yang terpenting di sini adalah nilai pengorbanan. Dengan nilai pengorbanan, mereka bisa keluar dari dalam dinding Gua dan menemukan cahaya matahari. Matahari diidealkan dengan *forma* kebaikan, idea kebaikan.[17]

Makna dari alegori Gua ini menurut Plato adalah pengorbanan dan pertobatan atau pembalikan arah jiwa yang mana pada awalnya berpuas pada bayangan. Konsep *Paideia* Plato ini juga menangkis doktrinisasi kaum sofis. Bagi Plato, kaum sofis adalah orang yang menjual pengetahuan tetapi tidak memberi pencerahan bagi orang Athena. Kaum sofis menjual pengetahuan sebagai alat untuk mendapatkan uang.[18]

---

16 Setyo Wibowo dan Haryanto Cahyadi, *Mendidik Pemimpin dan Negarawan*, 21.

17 Setyo Wibowo dan Haryanto Cahyadi, *Mendidik Pemimpin dan Negarawan*, 28.

18 Sudin, "Dari Sophia dan Shopos (Dari Kebijaksanaan dan Orang Bijak sampai Akal-akalan), *Refleksi 16,* no 1 (2016), 2-4.

Untuk mendidik calon pemimpin, intuisi pemikiran Plato menawarkan tiga pengandaian. Pertama adalah pemusatan pada jati diri manusia. Mendidik dalam konsep Plato ini berarti seni merawat jiwa dengan baik.[19] Konsep ini menegaskan bahwa jiwa manusia adalah sesuatu yang tidak tetap karena jiwa dapat mempengaruhi jiwa lainnya. Kedua adalah pentingnya imitasi. Menurut Plato, imitasi adalah cara seseorang bagaimana ia berorientasi pada dirinya sendiri. Lewat imitasi ini, seorang pribadi membiasakan tubuh dan jiwa untuk melakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi semua orang. Ketiga adalah sikap kritis dalam berpikir. Konsep yang ditawarkan oleh Plato adalah pentingnya kemampuan penalaran bagi para pemimpin didik. Dalam tradisi Yunani, itu dapat dilakukan dengan menggunakan mitos-mitos yang mengundang orang untuk terus mencari makna di balik apa yang disampaikan.

Filsafat Pendidikan dan Kepemimpinan Driyarkara

Biografi Driyarkara

Driyarkara lahir di lereng Pegunungan Menoreh, Jawa Tengah, pada 13 Juni 1913, dan meninggal pada 11 Februari 1967 di usia 53 tahun 8 bulan. Ia lahir dengan nama Soehirman dan biasa dipanggil Djenthu, yang berarti kekar dan gemuk. Soehirman berganti nama menjadi Driyarkara pada tahun 1935. Ia adalah anak bungsu keluarga Atma Sendjaja dari empat bersaudara. Kakaknya terdiri dari dua perempuan dan satu laki-laki.[20] Selain itu, ia adalah seorang imam Katolik. Dia lulusan teologi di Maastricht; kemudian melanjutkan pendidikan di Gent Belgia (1949-1950); setelah itu melanjutkan pendidikan filsafat di Universitas Gregoriana Roma (1950-1952). Dia menulis disertasi doktoral berjudul *Participationis Cognitio In Existential Dei Percipienda Secundum Malebranche Utrum Partem*

[19] Setyo Wibowo dan Haryanto Cahyadi, *Mendidik Pemimpin dan Negarawan*, 28.
[20] Maemonah, *Filsafat Pendidikan* (Yogyakarta: FA Press, 2015), 49.

Hebeat (Peranan Pengertian Partisipasi dalam Pengertian tentang Tuhan menurut Malebranche).[21]

Humanisasi sebagai Jalan menuju Kalos Khagatos

Bagi Driyarkara, konsep humanisasi sangat terkait dengan pemahaman tentang manusia. Menurutnya, manusia memiliki badan dan jiwa. Jiwa adalah prinsip rohani, sedangkan badan adalah prinsip jasmani.[22] Driyarkara melihat dua konsep ini sebagai hal yang kompleks. Hal pertama yang perlu disadari adalah bahwa manusia adalah makhluk berbadan. Manusia menjalankan aktivitas harian dengan menggunakan tubuhnya. Jika tubuh mengalami kekurangan, maka kemampuan menangkap kenyataan juga akan berkurang.[23]

Driyarkara melihat badan manusia seperti makhluk hidup lainnya. Badan manusia memiliki indra dan membutuhkan makanan. Namun, jika manusia hanya dipahami dari badannya saja, maka pandangan itu belum lengkap. Melihat manusia hanya dari badan sama dengan bertanya "Apa" dan bukan "Siapa." Driyarkara berpendapat, pertanyaan "Apa" dan "Siapa" bukan hanya soal kata "si" . Menurutnya, pertanyaan "Siapa" mengacu pada manusia lebih dari sekadar "Apa" . Karena itu, manusia tidak bisa hanya dipandang sebagai objek jasmani atau badan. Manusia juga adalah subjek dengan kesadaran diri atau jiwa. Jadi, manusia adalah "Siapa", bukan hanya sekadar "Apa". **[24]**

Untuk menyatukan pertanyaan "Apa" dan "Siapa" dalam manusia, Driyarkara memakai konsep "aku." Saat seseorang membicarakan dirinya, ia tidak membahas hanya tubuh atau jiwa. Ia berbicara tentang keseluruhan "aku." Tidak dapat dipungkiri, saat

---

[21] Restu Angga Permana, "Pemikiran Driyarkara Tentang Pendidikan dan Implikasinya Bagi Etika Pancasila", *Jurnal Dirosah Islamiyah* 6, (2024): 428.

[22] Driyakara, *Driyarkara tentang Manusia* (Yogyakarta: Kanisius, 1978), 11.

[23] Driyarkara, *Driyarkara tentang Manusia*, 10.

[24] Sudiarja, dkk. (ed), *Karya Lengkap Driyarkara Esay-Esay Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa*, 389.

seseorang berbicara tentang diri, ia melibatkan tubuh dan jiwa. Alasannya adalah karena manusia menyadari bahwa tubuh dan jiwa adalah bagian dari "aku." Namun, jika hanya satu aspek yang dibahas, kesatuan diri manusia hilang. Idealnya, saat membicarakan diri, seseorang menyadari bahwa "aku" terdiri dari tubuh dan jiwa.[25]

Dengan memahami unsur manusia menurut Driyarkara, kita bisa mengerti konsep humanisasi. Driyarkara melihat humanisasi sebagai langkah lanjutan setelah hominisasi. Humanisasi adalah usaha untuk memanusiakan manusia sesuai kodratnya. Jika manusia ingin memanusiakan dirinya, yang berarti dia perlu membudaya, maka proses ini akan melibatkan kebudayaan secara kolektif. Driyarkara menggarisbawahi tiga poin penting yang harus diperhatikan, yaitu (i) manusia perlu memanusiakan dirinya, (ii) dalam memanusiakan diri, manusia selalu membudayakan dirinya, dan (iii) dalam membudayakan diri, manusia berinteraksi secara kolektif. Memanusiakan manusia berarti menjadikannya setia pada kodratnya sebagai makhluk jasmani dan rohani, individu dan sosial, serta sebagai pribadi yang mandiri sebagai ciptaan Allah. Melalui proses ini, manusia menemukan makna dalam hidupnya, yang selalu terhubung dengan budaya yang dianut oleh komunitasnya. Pembudayaan diri ini selalu berlangsung secara bersama, yang menunjukkan adanya interaksi antara individu satu dengan lainnya.[26]

Pendidikan adalah kegiatan yang bersifat universal dalam kehidupan manusia. Secara historis, pendidikan telah ada sejak zaman purba, mulai dari peradaban yang paling sederhana hingga yang paling kompleks seperti sekarang. Oleh karena itu, tidak ada masyarakat yang tidak terlibat dalam kegiatan pendidikan. Pendidikan selalu menyatu dengan kehidupan manusia, bahkan dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Selama manusia hidup bersama, proses pendidikan senantiasa

[25] Driyarkara, *Driyarkara tentang Manusia*, 12.
[26] H. B. Uno, *Landasan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), 39.

berlangsung, karena pada dasarnya, pendidikan adalah usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya.[27]

Pendidikan humanistik mengarahkan perilaku dan sikap peserta didik. Proses ini bertujuan untuk membentuk kedewasaan diri mereka. Peserta didik diharapkan memiliki mental yang matang dan baik. Manusia terdidik wajib menempatkan diri dengan benar. Mereka perlu memiliki pengendalian diri yang kuat dan menghargai nilai kemanusiaan.[28]

Menurut Driyarkara, hanya memiliki keahlian saja tidaklah cukup. Keahlian perlu disertai pendidikan pribadi. Ia berpendapat, "Pintar tanpa kesusilaan hanya akan menjadi minteri dalam arti sikap mau menyalahgunakan kepandaian."[29] Secara eksplisit, Driyarkara memakai pendekatan fenomenologi untuk menggambarkan dasar pendidikan. Ia tidak hanya melihat hal-hal yang tampak dalam pendidikan. Ia juga mengamati yang tersembunyi di balik fenomena pendidikan. Singkatnya, lewat fenomena, Driyarkara mencoba memahami inti atau noumena. Menurutnya, fenomenologi tidak hanya memandang yang terlihat saja. Namun, fenomenologi juga mengarahkan manusia untuk mencapai kesadaran dalam situasi kompleks.[30]

Bagi Driyarkara, jiwa pendidikan bukanlah konsep yang abstrak. Jiwa pendidikan berakar dari kenyataan yang kompleks. Jiwa pendidikan adalah proses untuk memanusiakan manusia muda. Proses ini membantu mereka untuk mencapai taraf kemanusiaan.[31] Proses ini terjadi melalui interaksi pendidik dan peserta didik dalam

---

[27] H. B. Uno, *Landasan Pendidikan*, 40.

[28] Esther Christiana, "Pendidikan yang Memanusiakan Manusia," *Humaniora* 4, no.1 (2013): 398-400.

[29] Asep Rifqi Abdul Aziz, "Konsep Hominisasi dan Humanisasi Menurut Driyarkara," *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat,* 17, (2016): 136.

[30] Sudiarja, dkk. (ed), *Karya Lengkap Driyarkara Esay-Esay Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa*, 360.

[31] Sudiarja, dkk. (ed), *Karya Lengkap Driyarkara Esay-Esay Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa*, 364.

pergaulan. Interaksi ini menjadi tempat tumbuhnya pendidikan. Driyarkara menekankan bahwa mendidik adalah aktivitas penting yang menyentuh akar kehidupan manusia. Mendidik dapat mengubah dan menentukan arah hidup seseorang.[32] Karena itu, ada perbedaan antara konsep pendidikan dan penerapannya. Pendidikan adalah wujud dari nilai-nilai yang diterapkan dapat membentuk manusia ideal yang baik secara etika, karakter maupun bijaksana secara intelektual. Pembentukan etika, karakter, dan moral sebagai pendidikan itu sendiri.

Dengan demikian, konsep humanisasi menurut Driyarkara adalah langkah penting menuju *kalos kagathos*. Saat mendidik, fokus kita tidak hanya pada pengetahuan. Kita juga perlu mengembangkan karakter yang baik dan indah seperti kejujuran, disiplin, solidaritas, jujur, bertanggung jawab. dan gotong royong. Ini adalah perjalanan untuk menggabungkan kebaikan dan keindahan dalam diri manusia. Tujuannya adalah untuk menjadikan individu yang utuh dan berguna bagi masyarakat. Dengan pendidikan humanistik, yang berlandaskan interaksi dan pemahaman diri, manusia diharapkan cerdas, sekaligus juga perlu bermoral dan memiliki rasa estetika. Ini akan menciptakan harmoni dalam kehidupan sehari-hari.

Relevansi Pemikiran Plato dan Driyarkara dalam Pendidikan Kepemimpinan di Indonesia

Pluralisme dan Demokrasi Indonesia Saat Ini

Zaman kontemporer ditandai dengan berbagai gelagat baru. Karena itu, zaman ini sering disebut “post” atau “pasca”. Peradaban yang berkembang menjadikan dunia semakin kecil, sehingga semua orang bisa saling berinteraksi. Sekarang orang bisa berelasi secara lebih transparan karena benteng etnis dan budaya runtuh. Pluralisme menjadi semakin luas dan tajam menantang refleksi.[33]

---

[32] Sudiarja, dkk. (ed), *Karya Lengkap Driyarkara Esay-Esay Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa*, 358.

[33] I. Bambang Sugiharto, dan Agus Rachmat W, *Wajah Baru Etika dan Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 146

Di sisi lain, perkembangan dunia mengalami cacat dalam bentuk bentrokan-bentrokan yang ditimbulkan oleh proses globalisasi. Secara sekilas, bentrokan- bentrokan itu hanya ditimbulkan oleh konflik kepentingan seperti di bidang politik, sosial, dan ekonomi.[34] Namun Hans Küng dalam *The Ethic of World Religions and Human Right* mengatakan "*without peace between religion there will be no peace between nations*."[35] Di zaman kontemporer sebagian besar fenomena yang terjadi terletak pada perbedaan-perbedaan dasar tentang realitas pluralisme religius.

Dalam pluralisme dan demokrasi, hak untuk berbeda tidak bisa diganggu gugat. Semua orang, siapapun dia dan dari mana asalnya memiliki hak untuk berbeda sebagai hak dasar. Perbedaan atau keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, sebagai potensi yang harus dikembangkan dan dibina. Percampuran kreatif antara pengaruh asing yang tak dapat dibendung di era kontemporer dengan tradisi-tradisi lokal dan inter-lokal membentuk kesadaran kebangsaan Indonesia modern dalam usaha membangun wadah tunggal dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan dan dibina secara benar, keberagaman ini akan berkembang menjadi sesuatu yang menakutkan. Karena itu, pendidikan dan formasi yang berbasis multikulturalisme merupakan suatu keharusan untuk menjunjung kewajiban berintegrasi dalam wajah demokrasi Indonesia.

Keberagaman sebagai identitas demokrasi Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang paling dibanggakan, dibangun atas dasar tujuan dan kepentingan bersama, yaitu

[34] I. Bambang Sugiharto, dan Agus Rachmat W, *Wajah Baru Etika dan Agama*, 144
[35] I. Bambang Sugiharto, dan Agus Rachmat W, *Wajah Baru Etika dan Agama*, 144

kemerdekaan Indonesia. Tujuan dan cita-cita kemerdekaan termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) alinea 4:

> Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ke--ter-tiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada KeTuhanan Yang Ma-ha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[36]

Dewasa ini, identitas keberagaman Indonesia sering dimaknai sebagai perbedaan yang mengarah ke sikap intoleran. Perbedaan tersebut semakin dipertajam maknanya dan sering dimanfaatkan pihak tertentu untuk memenuhi ambisi dan kepentingan pribadi atau golongannya. Banyaknya persoalan yang muncul di tanah air terutama dari aspek sosial, budaya, dan agama disinyalir menunjukan sikap intoleran. Fenomena-fenomena intoleran seperti konflik antar ras, agama, suku, golongan, dan perebutan kekuasaan di berbagai daerah adalah bukti nyata bahwa pemahaman terhadap nilai kebersamaan dan komitmen masih lemah. Dalam tubuh demokrasi Indonesia, kita boleh menyetujui keberadaan nilai dan cara hidup yang berbeda-beda. Namun, persetujuan ini berlaku sejauh tidak merugikan pihak lain.

> Kalau ada suatu cara hidup yang merugikan pihak atau kelompok lain, maka sesuai hukum positif, kekuasaan negara (puissance) harus campur tangan, dan campur tangan itu tetap dalam batas-batas tolerable. Maksudnya, campur tangan negara untuk mengatasi segala tindakan intoleransi hanya berlaku dengan cara-cara yang fair, manusiawi, adil dan baik sesuai hukum.[37]

---

[36] Pembukaan UUD 1945 alinea 4

[37] Felix Baghi (ed.), *Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi*, 41.

Interkulturalisme sebagai Identitas Bangsa Indonesia

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keaneka-ragaman yang sangat kompleks. Setiap suku bangsa di Indonesia yang jumlahnya mencapai ratusan bahkan ribuan mempunyai kekayaan pemikiran, sikap, dan perilaku yang tertuang dalam berbagai wujud kebudayaan. Sebagai negara yang multietnik, Indonesia didiami oleh sekitar 1028 etnik yang menggunakan bahasa lokal atau bahasa daerahnya sendiri-sendiri. Jumlah bahasa daerah mencapai sekitar 652 bahasa daerah.[38]

Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut dikenal dengan istilah masyarakat interkultural. Masyrakat interkultural adalah masyrakat yang menjujung tinggi rasa hormat dan pemahaman yang sama terhadap semua budaya. Fokus utama dalam komunikasi interkultural adalah adanya ruang pertukaran ide, dan nilai-nilai budaya dari berbagai daerah.[39] adapun, menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau. Setiap pulau dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Yang mencolok dari ciri kemajemukan masyarakat Indonesia adalah penekanan pada pentingnya ke-suku-bangsa-an yang terwujud dalam bentuk komunitas-komunitas suku bangsa, dan digunakannya ke-suku-bangsa-an sebagai acuan utama bagi jati diri. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri.

Dalam konsep interkultural Indonesia, terdapat kaitan yang erat bagi pembentukan masyarakat yang berlandaskan Bhineka Tunggal Ika dan mewujudkan suatu identitas nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia. Model masyarakat multikultural ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32

[38] Sensus Bandan Pusat Statistik (BPS), dalam https://www.Indonesia.go.id/profil/suku-bangsa, diakses pada Minggu, 06 Oktober 2024 pukul 11:00 WITA.

[39] Dikutip dari Transformasi Bersama dalam Komunitas Interkultural - Mosaic Mennonites, pada Senin, 24 Maret 2025.

UUD 1945, yang berbunyi "Kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah".[40] Dalam model masyarakat interkultural, sebuah masyarakat dilihat mempunyai kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut, yang coraknya seperti sebuah mozaik. Di dalam mozaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk wujud masyarakat yang lebih besar.

Pendidikan Menurut Plato dan Driyarkara untuk Menciptakan Pemimpin Kalos Kagathos Dalam Konteks Demokrasi di Tengah Masyarakat Plural di Indonesia

Indonesia yang multikultural menghadirkan tantangan besar bagi para pemimpin. Salah satu tantangan terbesarnya adalah menghindari radikalisme yang memecah belah. Selain itu, budaya komunikasi yang terbuka dan inklusif perlu dibangun.[41] Filosofi kepemimpinan Plato dan Driyarkara menawarkan dasar yang kuat. Pendidikan kepemimpinan mereka mendorong lahirnya pemimpin efektif dan bermoral. Pemimpin yang kuat dalam nilai multikultural sangat diperlukan.

Pemikiran Plato dan Driyarkara berangkat dari latar yang berbeda. Meskipun egitu, keduanya memberi kontribusi besar pada kepemimpinan di Indonesia. Pemikiran mereka membantu membentuk pemimpin yang adaptif di tengah kemajemukan.

Plato dalam *Republik* menekankan pentingnya "jiwa bijaksana" pada pemimpin. Pemimpin harus terlatih bertindak adil dan harmonis. Filosofi Plato menggambarkan pemimpin ideal sebagai "*philosopher-king*".[42] Pemimpin seperti ini bijaksana dan berpikir mendalam. Komitmen pada kebaikan bersama menjadi inti kepemimpinannya.

---

[40] Pembukaan UUD 1945 Pasal 32

[41] Muhammad AS Hikam, "Pendidikan Multikultural dalam Rangka Memperkuat Kewaspadaan Nasional Menghadapi Ancaman Radikalisme di Indonesia," *Global: Jurnal Politik Internasional* 17, no. 1 (2015): 8.

[42] Anton-Hermann Chroust, "Aristotle's Criticism of Plato's 'Philosopher King'," *Rheinisches Museum für Philologie* 111, no. 1 (1968): 16-22.

Di tengah pluralitas, pemikiran Plato mendorong wawasan luas pada pemimpin. Seorang pemimpin harus mengesampingkan kepentingan pribadi demi kesejahteraan rakyat. Keberanian mengambil keputusan adil di tengah perbedaan sangatlah penting.[43] Kemampuan membangun kebersamaan juga menjadi kunci relevansi di Indonesia.

Pendidikan, bagi Plato, adalah kunci membentuk pemimpin ideal. Pemimpin harus memiliki kecerdasan dan moralitas yang kuat. Pemimpin juga perlu terdidik dengan baik dalam kebaikan dan keadilan.[44] Oleh karena itu, pendidikan mendalam dan komprehensif menjadi sangat penting. Pendidikan seperti ini menciptakan pemimpin bijaksana di masyarakat majemuk.

Driyarkara juga menekankan pentingnya pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pemikirannya sejalan dengan kepemimpinan yang menghargai keberagaman. Bagi Driyarkara, manusia adalah "makhluk *monodualis*".[45] Artinya, manusia memiliki eksistensi individu dan terikat pada masyarakat. Pendidikan harus membentuk individu kompeten yang mampu menghargai keberagaman. Driyarkara mendorong individu untuk merangkul perbedaan sebagai bagian hidup. Prinsip ini penting mencetak pemimpin yang memahami keadilan dan kemanusiaan.[46] Nilai multikultural tidak bisa dipisahkan dari pemimpin yang inklusif.

---

43 Yosef Redemptus Bria, Oktovianus Kosat, dan Mario Venerial Umbu Zerri, "Analisis Tantangan Bangsa Indonesia Menuju Bonum Communae: Perspektif Etika Eudaimonia Aristoteles," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4, no. 5 (2024): 1794-1796.

44 Selahattin Turan, "Plato's Concept of Education in 'Republic' and Aristotle's Concept of Education in 'Politics'," *Egitim ve Bilim - Education and Science* 36, (2011): 31-35.

45 Mulyono, "Pancasila sebagai Orthodoksi dan Orthopraksis dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara," *Humanika* 23, no. 2 (2016): 40-44.

46 Delfiyan Widiyanto dan Annisa Istiqomah, "Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan di Era Disrupsi," dalam *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan V Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta* 174, (2020): 691.

Driyarkara juga menekankan pentingnya pendidikan yang membentuk manusia utuh. Individu harus sadar akan tanggung jawabnya pada masyarakat.[47] Pendekatan humanis ini sangat penting bagi calon pemimpin. Pemimpin harus memahami empati, kerja sama, dan dialog. Pendidikan yang menanamkan nilai kemanusiaan sangat penting. Ini mendorong pemimpin peka pada kebutuhan masyarakat. Di masyarakat beragam, pemimpin harus peka pada aspirasi setiap golongan.

Pemimpin dengan Demokrasi Komunikatif

Indonesia yang mencita-citakan masyarakat demokrasi yang tertata dengan baik (*well-ordered society*) perlu memperhatikan keseimbangan antara tuntutan hak dan kewajiban politik praktek. Di sini dibutuhkan nilai dan tuntutan keadilan dalam terang politik diferensiasi. Politik diferensiasi bersentuhan dengan relasi-relasi yang melampaui waktu dan jarak.[48]Relasi-relasi ini melampaui perbedaan, keterasingan, keberlainan, bersentuhan dengan yang minoritas, yang marginal, yang bukan kita, bukan kami, dan lain-lain. Singkatnya diferensiasi berkaitan menyentuh kompleksitas ruang kehidupan yang majemuk: ruang kerja, ruang pasar, ruang komersial, ruang agama, ruang budaya, ruang publik, termasuk ruang privat yang berbeda-beda.

Dalam konteks demokrasi dan politik diferensiasi, kompleksitas ruang kehidupan mengemukakan diri dalam komunitas politik. Marion Young menekankan pentingnya dialog dan komunikasi yang terbuka antara semua elemen masyarakat. Ia percaya bahwa melalui dialog yang konstruktif, masyarakat dapat mencapai pemahaman bersama dan mencari solusi atas persoalan-persoalan kolektif yang dihadapi.[49]

---

[47] Agam Ibnu Asa, "Pendidikan Karakter Menurut Ki Hadjar Dewantara dan Driyarkara," *Jurnal Pendidikan Karakter* 10, no. 2 (2019): 245-247.

[48] Irish Marion Young, dalam Felix Baghi (ed.), *Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2012), 38

[49] Sylvester Kanisius Laku, "Menakar 'Yang Kreatif' Dalam Demokrasi Komunikatif," *Jurnal Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024): 236-237, https://doi.org/https://doi.org/10.26593/jsh.v4i02.8950.

Demokrasi komunikatif menjadi unggul karena terbuka pada komunikasi dari perspektif diversitas kultural. Perspektif ini tidak terbatas pada konsep, argumen dan proposisi-proposisi yang konvensional-deliberatif.

> Demokrasi komunikatif bersentuhan dengan sapaan (greeting) dalam ruang kehidupan, kesanggupan berkomunikasi (rhetoric) yang selalu tersituasi (situatedness of communication), misalnya kesanggupan pembicara untuk mengungkapkan diri dengan baik, kapasitas pendengar untuk menerima dengan hati serta kesempatan pembicara untuk saling menerima dan memahami perbedaan itu.[50]

Demokrasi komunikatif mengedepankan dialog terbuka serta komunikasi yang jujur. Pandangan ini selaras dengan Driyarkara yang menekankan interaksi sosial. Nilai kebersamaan dan kemanusiaan menjadi hal utama dalam interaksi itu. Demokrasi komunikatif memungkinkan setiap kelompok menyampaikan pandangannya. Dengan begitu, tercipta kebijakan yang adil dan merata.

Pemimpin yang dialogis, menurut Driyarkara, memperkuat kohesi sosial. Pendekatan yang inklusif dan sensitif menjadi ciri utama. Pemimpin perlu memperlakukan perbedaan sebagai aset bangsa. Perbedaan dianggap sebagai kekayaan, bukan ancaman bagi persatuan. Di sisi lain, pemimpin perlu berani menjaga keadilan di tengah perbedaan. Plato menyatakan bahwa keadilan penting untuk meredam konflik.[51] Konflik seringkali muncul karena prasangka atau ketidakpahaman. Pemimpin yang baik berperan sebagai fasilitator. Dia mengajak semua pihak untuk menyelesaikan perbedaan lewat dialog.[52] Sikap ini membangun kepercayaan publik terhadap integritas pemimpin. Kepemimpinan seperti ini menjaga persatuan di tengah keberagaman.

---

50 Felix Baghi (ed.), *Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi*, 38-39.

51 David Keyt, "Plato on Justice," dalam *Socratic, Platonic and Aristotelian Studies: Essays in Honor of Gerasimos Santas* (Dordrecht: Springer Netherlands, 2011), 255-270.

52 David Kennedy, "The Role of a Facilitator in a Community of Philosophical Inquiry," *Metaphilosophy* 35, no. 5 (2004): 744-765.

Kepemimpinan multikultural juga menuntut pemahaman tentang keadilan sosial. Driyarkara menekankan bahwa pemimpin harus jadi pelindung bagi semua. Pemimpin ini menjamin hak individu tanpa memandang latar belakang. Setiap orang, menurutnya, harus memiliki kesempatan untuk berkembang. Kebijakan yang dibuat harus inklusif dan tidak diskriminatif. Pemimpin yang berorientasi keadilan memenuhi kebutuhan semua lapisan. Prinsip keadilan ini menciptakan masyarakat yang harmonis. Setiap individu merasa dihargai sebagai bagian dari bangsa majemuk.[53]

Pada akhirnya, pemikiran Plato dan Driyarkara dapat menjadi dasar pendidikan kepemimpinan di Indonesia. Nilai kebijaksanaan, keadilan, dan humanisme membentuk pemimpin yang bermoral. Pemimpin ini tidak hanya cerdas intelektual tetapi juga peka terhadap perbedaan. Pendekatan ini mendukung cita-cita bangsa yang berkeadilan dan inklusif. Keberagaman budaya, agama, dan etnis menjadi kekayaan yang memperkuat persatuan.

KESIMPULAN

Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dalam menjalankan demokrasi. Salah satu tantangan tersebut adalah krisis moralitas di kalangan pemimpin. Selain itu, ada juga masalah lemahnya kepemimpinan di berbagai sektor. Untuk mengatasi masalah ini, pendidikan calon pemimpin sangatlah penting. Calon pemimpin harus berciri *kalos kagathos*. Ini berarti pemimpin tidak hanya harus cerdas, tetapi juga berintegritas moral. Mereka juga perlu memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi.

Konsep *kalos kagathos* dari Plato menekankan pentingnya pendidikan. Pendidikan adalah alat untuk membentuk karakter pemimpin ideal. Di sisi lain, Driyarkara

[53] Sudiarja, dkk. (ed), *Karya Lengkap Driyarkara Esay-Esay Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa*, 296

menambahkan dimensi humanisasi dalam pemikiran ini. Menurutnya, manusia adalah makhluk utuh yang terdiri dari tubuh dan jiwa. Dalam masyarakat Indonesia yang beragam, pendidikan harus inklusif. Pendidikan juga perlu berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Dengan pendekatan ini, pemimpin diharapkan mampu menghargai perbedaan. Mereka harus dapat menciptakan keadilan sosial dan membangun komunikasi yang baik.

Baik Plato maupun Driyarkara memberikan kontribusi penting untuk pendidikan kepemimpinan. Keduanya mendorong pembentukan pemimpin yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan. Pemimpin juga harus memiliki moralitas yang baik. Selain itu, mereka perlu empati terhadap masyarakat yang beragam. Dengan pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip ini, Indonesia diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang responsif. Pemimpin yang adaptif sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan demokrasi. Terutama dalam konteks pluralitas yang ada di masyarakat kita.

DAFTAR PUSTAKA

Abi, Antonius Remigius. "Paradigma Membangun Generasi Emas Indonesia Tahun 2045." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2017): 85-90.

Baghi, Felix, ed. *Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.

Berberabe, D., dan B. Marie. "Plato's Republic: The Role of Education in Democracy." *Budhi* 25, no. 3 (2021): 1-38.

Bria, Yosef Redemptus, Oktovianus Kosat, dan Mario Venerial Umbu Zerri. "Analisis Tantangan Bangsa Indonesia Menuju Bonum Communae: Perspektif Etika Eudaimonia Aristoteles." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4, no. 5 (2024): 1794-1806.

Chroust, Anton-Hermann. "Aristotle's Criticism of Plato's 'Philosopher King.'" *Rheinisches Museum für Philologie* 111, no. 1 (1968): 16-22.

Christiana, Esther. "Pendidikan yang Memanusiakan Manusia." *Humaniora* 4, no. 1 (2013): 398-410.

Driyarkara. *Driyarkara tentang Manusia*. Yogyakarta: Kanisius, 1978.

Dover, K. J. *Greek Popular Morality in the Time of Plato and Aristotle*. California: University of California Press, 1974.

Fabio Maria Lopes Costa. "Demokrasi Indonesia Terdegradasi." Februari 2024. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/06/krisis-moralitas-akibatkan-degradasi-nilai-demokrasi-dalam-pemilu-2024. Diakses pada 04 Oktober 2024.

Hendra Sanjaya. "Pentingnya Keberanian Moral dalam Krisis Kepemimpinan." Maret 2023. https://www.kompas.id/baca/buku/2023/03/06/pentingnya-keberanian-moral-dalam-krisis-kepemimpinan. Diakses pada 03 Oktober 2024.

Herrmann, Fritz-Gregor. "Dynamics of Vision in Plato's Thought. *Helios* 40, no. 1 (2013): 281-307.

Hikam, Muhammad AS. "Pendidikan Multikultural dalam Rangka Memperkuat Kewaspadaan Nasional Menghadapi Ancaman Radikalisme di Indonesia." *Global: Jurnal Politik Internasional* 17, no. 1 (2015): 1-17.

Laku, Sylvester Kanisius. "Menakar 'Yang Kreatif' Dalam Demokrasi Komunikatif." *Jurnal Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024). https://doi.org/https://doi.org/10.26593/jsh.v4i02.8950.

Klosko, George. *The Development of Plato's Political Theory*. Edisi kedua. New York: Oxford University Press, 2006.

Keyt, David. "Plato on Justice." Dalam *Socratic, Platonic and Aristotelian Studies: Essays in Honor of Gerasimos Santas*. Dordrecht: Springer Netherlands, 2011, 255-270.

Kennedy, David. "The Role of a Facilitator in a Community of Philosophical Inquiry." *Metaphilosophy* 35, no. 5 (2004): 744-765.

Maemonah. *Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: FA Press, 2015.

Permana, Restu Angga. "Pemikiran Driyarkara Tentang Pendidikan dan Implikasinya Bagi Etika Pancasila." *Jurnal Dirosah Islamiyah* 6 (2024): 428.

R, Siti Zuhro. "Pemilu 2024 dan Kepemimpinan Nasional." Februari 2024. https://www.kompas.id/baca/opini/2024/02/13/pemilu-2024-dan-kepemimpinan-nasional. Diakses pada 03 Oktober 2024.

Rifqi Abdul Aziz, Asep. "Konsep Hominisasi dan Humanisasi Menurut Driyarkara." *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 17 (2016): 136.

Sudin. "Dari Sophia dan Shopos (Dari Kebijaksanaan dan Orang Bijak sampai Akal-akalan)." *Refleksi* 16, no. 1 (2016): 1–17.

S. Supriyono dan M. M. Adha. "Membangun Kepemimpinan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Masyarakat Multikultural." *Jurnal Kultur Demokrasi* 9, no. 2 (2020): 1-10.

Sudiarja, dkk., ed. *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa*. Yogyakarta: [Penerbit tidak dicantumkan], 2018.

Turan, Selahattin. "Plato's Concept of Education in 'Republic' and Aristotle's Concept of Education in 'Politics.'" *Egitim ve Bilim - Education and Science* 36 (2011): 31-38.

Uno, H. B. *Landasan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2022.

Wibowo, Setyo, dan Haryanto Cahyadi. *Mendidik Pemimpin dan Kenegaraan*. Yogyakarta: Lamalera, 2014.

Wijayanto, dan Fajar Nursahid. "Masalah-Masalah Demokrasi Kita Hari Ini." Agustus 2019. https://news.detik.com/kolom/d-4650749/masalah-masalah-demokrasi-kita-hari-ini. Diakses pada 01 Oktober 2024.

Young, Irish Marion. Dalam Baghi, Felix, ed. *Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi.* Maumere: Penerbit Ledalero, 2012, 38.